

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang terus diupayakan oleh pemerintah telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru. Salah satu target reformasi keuangan negara adalah tercapainya tata kelola keuangan yang baik. Pada UU No 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengharuskan penerapan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang menandakan berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) ini diyakini mampu memberikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual yang akan diberlakukan penuh bagi semua Kementrian / Lembaga dan Pemerintahan Daerah pada 2015 (Tempo, 2010) . Tetapi hal ini sulit diwujudkan melihat beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang belum siap untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Hasil Pemeriksaan Sementara (IHSP) oleh BPK . Tiga tahun setelah PP No. 71 Tahun 2010 disahkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika banyak

pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini WTP, maka dapat diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual penuh pada tahun 2015 tidak akan menghadapi kendala yang berarti.

Data yang diakses dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) menunjukkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Provinsi Yogyakarta yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sepenuhnya. Masih ada dua kabupaten yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2012. Meskipun begitu, data yang diakses pada [www.dppka.jogjaprov.go.id](http://www.dppka.jogjaprov.go.id) menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015, sistem akuntansi yang diterapkan adalah akuntansi kas menuju akrual atau *cash toward accrual* dimana pendapatan dan belanja dicatat berdasarkan kas yang di terima atau kas yang dikeluarkan dari kas negara, sedangkan pencatatan aset, utang dan ekuitas menggunakan basis akrual atau berdasarkan hak kewajiban yang timbul. Laporan keuangan saat ini dalam sistem basis kas menuju akrual terdiri dari empat laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setelah menggunakan basis akrual, laporan keuangan terdiri 7 laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemerintah provinsi DIY mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan

serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan mampu menularkan pada pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang ada di DIY.

Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih jelas dan pertanggungjawaban yang lebih cepat serta lengkap sesuai SAP, menurut Nazier (2009) menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa permasalahan yaitu penyiapan infrastruktur sistem administrasi (sistem akuntansi, sistem administrasi aset, dan sistem teknologi informasi) dan penyiapan aparat yang berkualitas (*qualified*) untuk menjalankan regulasi baru tersebut. Untuk menunjukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantungan banyak daerah (kabupaten/kota) pada jasa konsultan untuk menyiapkan laporan keuangannya.

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Simanjuntak dalam Ardiansyah, 2012). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi (*hardware* dan *software*) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan

dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan baik dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal, sehingga penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapainya diperlukan faktor –faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian yang meneliti tentang faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu Indah (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aldiani (2009) meneliti tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, dan Ardiansyah (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.71 tahun 2010 pada KPPN Malang. Penelitian ini akan mengacu pada tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian Indah (2008), Aldiani (2009), dan Ardiansyah (2012).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda. Hasil dari penelitian Aldiani (2009) dan Indah (2008) menunjukkan Sumber Daya Manusia

(SDM) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual . Komitmen Organisasi juga berpengaruh terhadap implementasi SAP basis akrual menurut penelitian Aldiani (2010). Sedangkan dalam penelitian Ardiansyah (2012) SDM dan komunikasi berpengaruh, tetapi komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP.

Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Yogyakarta yang masih menggunakan sistem akuntansi *cash toward accrual*, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
2. Apakah komitmen organisasi yang ada di pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
4. Apakah tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
5. Apakah sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual (terlebih faktor SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi) yang memiliki hasil berbeda satu dengan lainnya dengan penerapan di Pemerintah Provinsi DIY.
2. Untuk memperdalam hasil penelitian sebelumnya dengan menambah deskriptif mengenai hasil penelitian , sehingga tidak hanya melihat dari hasil uji regresinya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Praktek**

Hasil dari riset akan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan basis akrual secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis akrual dengan meninjau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. Perbaikan praktek diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **2. Kontribusi Kebijakan**

Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan – kebijakan lain di lingkungan pemerintah yang akan dipertimbangkan setelah melihat riset yang telah dilakukan.